

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengawasan lembaga non-pemerintah terhadap kinerja DPR dalam fungsi legislasi pada tahun 2019–2024 (kasus FORMAPPI), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kinerja legislasi DPR periode 2019–2024 dinilai belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi legislasi sebagai salah satu fungsi utama lembaga perwakilan belum dijalankan secara maksimal. Dalam perspektif representasi politik, produktivitas legislasi yang rendah berpotensi mencerminkan belum efektifnya DPR dalam menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik.

Kedua, relevansi sejumlah undang-undang yang dihasilkan masih dipertanyakan dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Kritik FORMAPPI menyoroti adanya kecenderungan bahwa beberapa produk

legislasi belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik, melainkan lebih mencerminkan agenda politik tertentu. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara fungsi representasi yang ideal dengan praktik legislasi yang terjadi, sehingga DPR menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap regulasi benar-benar responsif terhadap dinamika sosial.

Ketiga, kualitas pembentukan undang-undang juga menjadi perhatian utama. Minimnya partisipasi publik, keterbatasan transparansi, serta proses pembahasan yang dinilai berlangsung terlalu cepat menunjukkan bahwa prosedur legislasi cenderung bersifat elitis. Dalam perspektif *deliberative democracy*, legitimasi suatu undang-undang sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, apabila ruang partisipasi tidak terbuka secara luas, maka legitimasi demokratis produk hukum berpotensi melemah.

Secara keseluruhan, kritik FORMAPPI tidak hanya menggambarkan persoalan teknis dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga menunjukkan tantangan yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi legislatif di Indonesia. DPR sebagai lembaga legislatif dituntut tidak hanya meningkatkan kuantitas legislasi, tetapi juga memastikan bahwa proses dan substansi regulasi mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penguatan fungsi legislasi menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi institusi parlemen dalam sistem demokrasi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi DPR RI.** DPR perlu meningkatkan kualitas perencanaan legislasi dengan menyusun target Prolegnas yang lebih realistis dan

berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, mekanisme partisipasi publik harus diperkuat melalui forum konsultasi terbuka, publikasi draf RUU yang mudah diakses, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjaring aspirasi masyarakat secara lebih luas. Transparansi dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang juga perlu ditingkatkan guna memperkuat legitimasi demokratis.

2. **Bagi Pemerintah.** Sebagai mitra legislasi, pemerintah diharapkan dapat mendorong proses pembentukan undang-undang yang lebih inklusif dan deliberatif. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan perlindungan masyarakat.
3. **Bagi Masyarakat Sipil.** Organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga pemantau parlemen seperti FORMAPPI, perlu terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja legislasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan menjadi kontrol penting dalam mendorong terciptanya produk hukum yang lebih responsif dan akuntabel.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya.** Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis kualitatif terhadap penilaian lembaga pemantau parlemen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar periode parlemen atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur secara lebih sistematis efektivitas pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja legislasi DPR.

DPR atau mengkaji kualitas undang-undang melalui analisis yuridis yang lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas fungsi legislasi di Indonesia.